

---

# IMPLEMENTASI PROSEDUR PENGAJUAN UANG MUKA DAN PERTANGGUNG JAWABAN UANG MUKA SEBAGAI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGELUARAN KAS

Erlinda Nurbidaningsih<sup>1</sup>, Ahmad Nukman Ginanjar<sup>2</sup>, Irsan Herlandi Putra<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Akuntansi, Akuntansi, Institut Digital Ekonomi LPKIA

<sup>3</sup> Institut Digital Ekonomi LPKIA, Jl. Soekarno Hatta 456 Bandung 40266

<sup>1</sup> [230634003@fellow.lpkia.ac.id](mailto:230634003@fellow.lpkia.ac.id), <sup>2</sup> [ahmad@lpkia.ac.id](mailto:ahmad@lpkia.ac.id), <sup>3</sup> [irsanherlandiputra@lpkia.ac.id](mailto:irsanherlandiputra@lpkia.ac.id)

---

## Abstrak

Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas merupakan sistem yang harus dirancang dan diterapkan dengan baik dalam mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen. Banyaknya kasus kecurangan yang terjadi di suatu organisasi diakibatkan oleh sistem pengawasannya yang buruk. Oleh karena itu Sistem Informasi Akuntansi perlu diterapkan oleh Perusahaan sebagai alat monitoring. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan prosedur terkait pengeluaran kas yang berfokus terhadap prosedur pengendalian uang muka dan pertanggungjawaban atas uang muka yang diajukan oleh karyawan. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi Perusahaan dalam memperbaiki dampak yang timbul serta diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi perusahaan. Pendekatan studi kasus kualitatif digunakan sebagai metode penelitian. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi pengeluaran kas dan pertanggungjawaban di Perusahaan masih kurang efektif. Minimnya pengawasan membuat karyawan kurang bertanggungjawab dalam melaporkan bukti transaksi pengeluaran kas. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini berkontribusi dalam memberikan wawasan bagi perusahaan tentang pentingnya fungsi pengawasan dalam penerapan sistem prosedur operasional.

**Kata kunci :** *Sistem Informasi Akuntansi, Pengeluaran Kas, Implementasi Prosedur*

---

## 1. Pendahuluan

Uang muka kerja yang digunakan untuk biaya rutin dan biaya operasional proyek dan pemeliharaan pada perusahaan. Uang muka kerja perlu dilakukan penganggarannya pada Perusahaan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik. Tentu saja hal ini diperlukan SOP sebagai penunjang sistem informasi akuntansi yang baik serta diperlukan pengendalian intern yang baik pula untuk memantau seluruh kegiatan operasional Perusahaan.

Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya seperti orang dan kelengkapan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi sebuah informasi. Sistem informasi akuntansi dapat memberikan informasi yang handal dan dapat menyediakan informasi yang berkualitas bagi pihak yang membutuhkan, harus bebas dari kesalahan, tidak bias dan harus jelas maksud dan tujuannya. Untuk dapat menghasilkan informasi

dengan karakteristik tersebut data yang diproses dalam sistem informasi akuntansi harus data yang benar dan akurat agar menghasilkan informasi yang dapat dipercaya.

Menurut Purwanto (2003: 60-61) proses tujuan yang jelas bagi suatu organisasi dapat membantu proses pengambilan keputusan yang mencakup beberapa hal, diantaranya adalah: a). Keputusan untuk meneruskan pesan bisnis; b). Keputusan untuk menanggapi audien; c). Keputusan untuk memusatkan pesan, dan d). Keputusan untuk menetapkan media yang akan digunakan.

Untuk pemanfaatan dapat dana mengoptimalkan anggaran, dalam menunjang proses pembiayaan operasional perusahaan maka pelaksanaan anggaran perlu dilakukan dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Sistem yang disusun dengan baik dan benar dan didukung dengan prosedur perusahaan yang sistematis akan menghasilkan informasi yang akurat yang dapat digunakan dalam melaksanakan anggaran tersebut.

Banyaknya kasus kecurangan yang terjadi di suatu perusahaan diakibatkan oleh sistem

pengawasannya yang buruk. Standar Operasional Prosedur memiliki manfaat bagi perusahaan dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan. Secara khusus, SOP bertujuan memberikan panduan mengenai pembagian tugas, penetapan tanggung jawab, hingga pemeriksaan. Meskipun sudah banyak organisasi yang menerapkan SOP, namun kondisi dilapangan terkadang menunjukkan hal yang berbeda. Tidak sedikit perusahaan yang belum mempraktikkan SOP sebagai sistem informasi akuntansi dengan semestinya. Berbagai alasan muncul karena organisasi belum menerapkan SOP secara maksimal, seperti minimnya pengendalian atasan hingga kurangnya kesadaran para pelaksana. Dengan begitu, potensi munculnya tindakan menyimpang dapat terjadi karena tidak ada regulasi yang mengatur proses keuangan perusahaan. Masalah yang ditemukan pada perusahaan tempat penelitian ini disebabkan SOP yang digunakan belum secara maksimal diterapkan. Hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa sistem pengeluaran kas di perusahaan memiliki celah untuk dimanipulasi atau dicurangi. Fraud perlu dihindari organisasi sebab merugikan secara finansial, merusak nama baik, dan menurunkan kepercayaan publik.

Berdasarkan latar belakang di atas, Sistem Operasional Prosedur (SOP) dari perusahaan tempat penelitian ditemukan beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan SIA pengeluaran kas dan memberikan rekomendasi terkait masalah yang ditemukan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi mengenai penerapan SOP sebagai sistem informasi akuntansi pengeluaran kas.

## 2. Kajian Pustaka

Menurut Mulyadi (2016:4) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap suatu transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Sedangkan menurut Baridwan (2012:3) "Prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan kerani(clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi Perusahaan yang sering terjadi". Berdasarkan pengertian prosedur dari para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur adalah urutan kegiatan klerikal yang melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih yang disusun untuk menjamin penanganan yang seragam pada transaksi-transaksi perusahaan yang berulang-ulang.

Sebuah sistem dilakukan untuk mencapai tidak hanya satu tujuan, tetapi beberapa tujuan. Misal suatu sistem memberikan pengukuran terhadap waktu, kinerja, informasi, dan justifikasi dasar dalam memberikan tujuan. "Jika sebuah system tersebut tidak dapat memenuhi tujuan maka harus berulang kali atau yang secara rutin terjadi" (Mulyadi 2016:2)

Pengendalian intern merupakan seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aktiva atau kekayaan Perusahaan dari segala bentuk penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana semestinya oleh seluruh karyawan (Hery, 2007:195). Pengendalian intern ini sendiri sangat dibutuhkan oleh setiap Perusahaan. Hal ini berguna untuk menghindari adanya masalah internal Perusahaan yang menyebabkan tidak lancarnya kegiatan operasional Perusahaan.

Selain adanya sistem yang baik dan prosedur yang sistematis, perusahaan juga harus didukung dengan adanya pengendalian internal dalam mengelola pengeluaran baik yang sifatnya kecil atau besar, rutin atau tidak rutin, bahkan mendadak atau yang sudah terencanakan. Dengan adanya pengendalian tersebut maka akan menghindarkan perusahaan dari adanya penyelewengan anggaran atau penyalahgunaan anggaran.

Menurut Mulyadi (2008:163) pengendalian intern memiliki beberapa tujuan, yaitu :

- a. Menjaga kekayaan organisasi
- b. Memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi
- c. Mendorong efisiensi operasional
- d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Pengendalian intern memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dapat terciptanya sistem pengendalian intern yang baik dalam Perusahaan. Menurut Mulyadi (2008:164-172)

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
- b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang dan pendapatan biaya.
- c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
- d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada PT Surya Energi Indotama yang berlokasi di Jl.

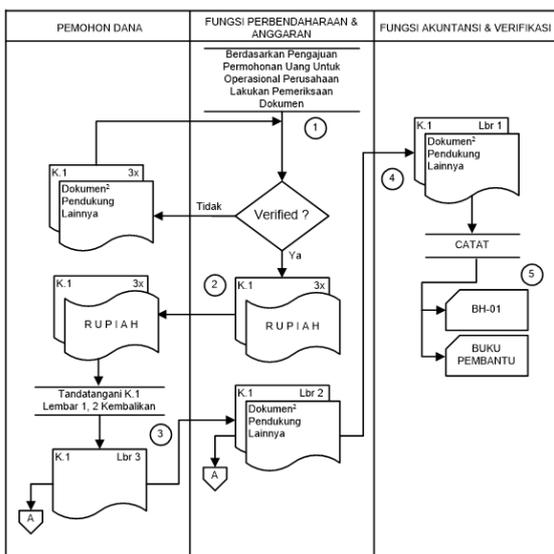
Soekarno Hatta No. 439, Kelurahan Kebon Lega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40235. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun focus penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi Pelaksanaan Prosedur permintaan Uang Muka Kerja dan Prosedur Pertanggung Jawaban Uang Muka Kerja
2. Pengaruh Implementasi Pengeluaran Kas atas Uang Muka Kerja dan Pertanggungjawabannya
3. Pengendalian Intern atas Sistem Informasi Pengeluaran Kas.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### Implementasi Pelaksanaan Prosedur Permintaan dan Pertanggung Jawaban Uang Muka Kerja

Prosedur Permintaan dan Pertanggung Jawaban Uang Muka Kerja yang ada di PT Surya Energi Indotama telah ada pemisahan fungsi berdasarkan kebutuhan. Dengan adanya pemisahan fungsi akan mempermudah dalam hal pengecekan dan pemeriksaan sehingga mengurangi kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaan permintaan dan pertanggung jawaban uang muka kerja.



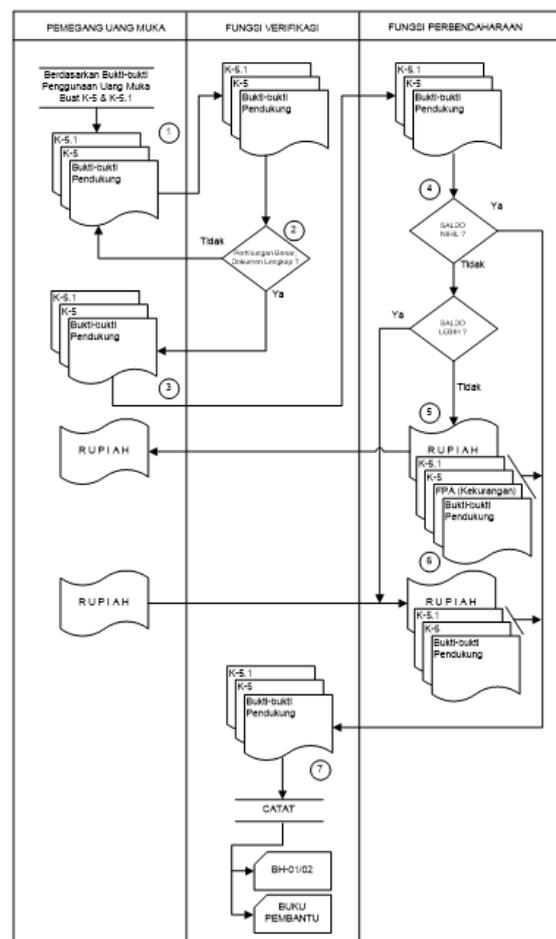
Gambar 4.1 Prosedur Pengeluaran Kas

Dalam pelaksanaan kegiatan pengeluaran kas atas kegiatan operasional meskipun diperusahaan sudah menggunakan sistem ERP masih terdapat beberapa hambatan diantaranya:

- a. User yang terbatas
- b. Adanya gangguan jaringan internet
- c. Approval pencairan
- d. Dokumen pendukung yang kurang lengkap

Hal-hal tersebut diatas menjadi hambatan dalam Implementasi Pelaksanaan Prosedur Permintaan dan Pertanggung Jawaban Uang Muka Kerja, hal yang paling sering terjadi adalah adanya penumpukan dokumen dibagian verifikator dikarenakan dokumen pengajuan yang tidak sesuai sehingga memerlukan waktu untuk melakukan konfirmasi sebagai informasi tambahan dalam mevalidasi dokumen pengajuan pengeluaran kas tersebut. Hal ini dapat menimbulkan dokumen hilang atau rusak, sebaiknya dokumen yang tidak sesuai dikembalikan ke user dan ditolak oleh bagian Verifikator. Ini akan meningkatkan

kedisiplinan pelaksana dalam mengajukan dokumen ke departemen akuntansi dan keuangan.



Gambar 4.2 Prosedur Pertanggung Jawaban Uang Muka

##### Pengendalian Intern atas Sistem Informasi Pengeluaran Kas

Pemisahaan wewenang antar bagian merupakan upaya pengendalian yang membantu kinerja perusahaan menjadi lebih efektif, efisien, serta membatasi kekeliruan. Oleh sebab itu, pihak berkepentingan diharapkan dapat membuat pengajuan dan pertanggungjawaban uang muka yang sesuai dengan realisasinya. Bagian keuangan dan akuntansi melakukan pengelolaan seluruh keuangan dan mengajukan persetujuan kepada atasan. Bagian otorisasi memberikan persetujuan dan melakukan pengawasan atas transaksi keuangan perusahaan. Sedangkan bagian bendahara membuat bukti kas keluar dan mengeluarkan uang. Pada pengajuan pertanggung jawaban uang muka sering terjadi keterlambatan penyampaian atau pengajuan pertanggung jawaban uang muka, hal ini berdampak terhadap tidak efektifnya pencatatan biaya di bagian akuntansi. Informasi yang terdapat pada laporan keuangan tidak sepenuhnya nyata, sehingga timbul GAP antara biaya real dan biaya yang tercatat pada laporan keuangan.

## 5. Kesimpulan

1. Perusahaan sudah memiliki system ERP dalam pengendalian dokumen, namun report dari ERP tersebut belum cukup informatif dalam memberikan informasi kepada pengguna maupun pelaksana.
2. SOP/Prosedur permintaan dan pertanggung jawaban Uang Muka Kerja sudah sesuai dengan semestinya, namun untuk pelaksanaan belum dilakukan secara maksimal oleh pelaksana/pemohon saat melakukan pertanggungjawaban sehingga informasi yang dipergunakan oleh bagian akuntansi belum sepenuhnya dapat diyakini. Bagian akuntansi mencatat biaya berdasarkan nilai uang muka yang diajukan oleh pelaksana. Dalam SOP Pertanggungjawaban sudah diatur waktu pemenuhan atau tengat waktu pertanggung jawaban uang muka sesuai penggunaannya hanya saja pelaksana/pemohon belum melaksanakan secara disiplin.
3. Pengendalian intern dalam Implementasi Prosedur Pengeluaran Kas Pengajuan Uang Muka dan Pertanggung jawaban belum secara maksimal terkendali. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya disiplin para pengguna/pemohon uang muka dalam melaksanakan pertanggungjawaban.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Baridwan, Zaki. 2012. *Sistem Akuntansi Keuangan*. Edisi Kelima. Yogyakarta: BPFE.
- [2] Galuh Afih Nurmalasari. Moch Dzulkirom AR. 2018. *Analisis Prosedur Permintaan dan Pertanggung Jawaban Uang Muka Kerja Dalam Upaya Peningkatan Pengendalian Internal*. Malang
- [3] Hery. 2007. *Siklus Akuntansi Perusahaan*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [4] Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Edisi 3. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- [5] Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Edisi 4. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- [6] O Feryanto. Encep Hadian. 2014. *Sistem Pengeluaran Kas dan Pengendalian Intern*. Bandung
- [7] Purwanto. 2003. *Komunikasi Bisnis*. Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.